

PENTINGNYA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Abednego Tri Gumono
Universitas Pelita Harapan
abednego_gumono@uph.edu

ABSTRAK

Indonesia adalah bangsa multidimensi dengan berbagai keragaman. Keragaman tersebut telah disatukan dalam sebuah terminologi Bhinneka Tuggal Ika serta Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Dalam perkembangannya, praktik berkehidupan berbangsa dan bernegara masih diwarnai oleh fragmentasi di setiap bidang kehidupan. Fragmentasi berpotensi kontra produktif terhadap cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Mencermati potensi-potensi keterpecahan bangsa yang dapat terjadi, dunia pendidikan terpanggil memberikan sumbangan pemikiran untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Makalah ini akan menjelaskan konsep dan praktik pendidikan multikultural sebagai jalan membentuk generasi yang menguasai konsep masyarakat madani. Menguasai konsep berarti mampu mendalami dan berinteraksi terhadap lingkungannya dalam bingkai masyarakat madani. Pendidikan multikultural menyajikan integrasi setiap mata pelajaran terhadap nilai-nilai multikultural. Kesimpulan dari makalah ini adalah pendidikan multikultural merupakan sarana pembentukan konsep masyarakat madani melalui pendidikan sehingga mampu mewujudkan cita-cita kesatuan masyarakat Indonesia sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang Undang dasar 1945

Kata kunci: *pendidikan multikultural, masyarakat madani*

PENDAHULUAN

Lahirnya reformasi sebagai proses demokratisasi selain menyumbangkan terwujudnya negara yang lebih demokratis juga telah memicu konflik sosial. Kebebasan individu yang telah melupakan semangat kesantunan dalam pola berinteraksi dengan

masyarakat mengakibatkan sendi-sendi hubungan antarsuku, agama, dan ras mulai goyah. Toleransi antarindividu semakin terancam dengan tereduksinya semangat menghargai dan menghormati kelompok masyarakat yang berbeda. Kondisi yang demikian tersebut memberikan rasa tidak aman, kebebasan individu tercerabut, serta menciptakan atmosfer kebebasan yang makin sempit.

Di sisi lain, kebebasan berekspresi dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga diwarnai dengan kekerasan demi kekerasan. Berbagai fakta tersebut muaranya kepada terjadinya kehancuran pluralisme sebagai karakteristik masyarakat madani. Masyarakat yang pluralis sebagai ciri kekuatan bangsa Indonesia pada dasa warsa terakhir justru menjadi ancaman fragmentasi. Munculnya semangat primordialisme semakin mengindikasikan dengan jelas gejala keterpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas dasar semangat kebhinekaan tersebut. Dengan terancamnya keutuhan bangsa dalam bingkai pluralisme, keselamatan individu sebagai umat manusia juga semakin terancam.

Ketimpangan dan kepincangan sosial di atas semakin rumit karena ketimpangan ekonomi terus melanda negara Indonesia. Angka kemiskinan pada tahun ini sekitar 31 juta penduduk. Meskipun pemerintah mengklaim penurunan angka kemiskinan, namun hal tersebut dibantah oleh berbagai kalangan. Penurunan tersebut malahan disebut sebagai sesuatu hal yang fiktif. Ini artinya bahwa di dalam masyarakat Indonesia angka kemiskinan masih tinggi. Tak pelak lagi, kesenjangan ekonomi dalam masyarakat semakin menganga sehingga mudah terjadi kerawanan sosial. Berbagai konflik dapat dengan mudah terjadi akibat kemiskinan dan keterpurukan ekonomi dalam sebagian besar masyarakat. Permasalahan ini juga masih diwarnai dengan fakta korupsi yang semakin merajalela. Ujung dari ketimpangan-ketimpangan tersebut adalah ketidakadilan sosial dimana setiap warga tidak secara proporsional mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berbagai permasalahan yang muncul di atas, menunjukkan bahwa upaya mewujudkan masyarakat yang madani di dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural penting diterapkan di

sekolah. Agus Rifai dalam makalah yang berjudul "Perpustakaan dan Pendidikan Multikulturalisme"(2006, hal 1-2) menyatakan bahwa pada dasawarsa terakhir, wacana multikulturalisme menjadi isu penting dalam upaya pembangunan kebudayaan di Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan Rifai didasarkan beberapa alasan. *Pertama*, bahwa secara alami atau kodrati, manusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman kebudayaan, dan oleh karena itu pembangunan manusia harus memperhatikan keanekaragaman budaya tersebut. Dalam konteks ke-Indonesia-an maka menjadi keniscayaan bahwa pembangunan manusia Indonesia harus didasarkan atas multikulturalisme mengingat kenyataan bahwa negeri ini berdiri di atas keanekaragaman budaya.

Kedua, bahwa ditengarai terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA (suku, agama, dan ras) yang melanda negeri ini pada dasawarsa terakhir berkaitan erat dengan masalah kebudayaan. Dari banyak studi menyebutkan salah satu penyebab utama dari konflik ini adalah akibat lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Menurut AlQadrie (2005), Profesor Sosiologi pada Universitas Tanjungpura Pontianak, berbagai konflik sosial yang telah menimbulkan keterpurukan di negeri ini disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, ide dan pendapat orang lain, karya dan jerih payah orang lain, melindungi yang lemah dan tak berdaya, menyayangi sesama, kurangnya kesetiakawanan sosial, dan tumbuhnya sikap egois serta kurang perasaan atau kepekaan sosial. Hal sama juga dikemukakan oleh Rahman (2005) bahwa konflik-konflik kedaerahan sering terjadi seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur. Oleh karena untuk mencegah atau meminimalkan konflik tersebut perlu dikembangkan pendidikan multikulturalisme (Rifai, hal 1,2 2006). *Ketiga*, bahwa pemahaman terhadap multikulturalisme merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang. Pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Bila kedua tanggung jawab besar itu dapat dicapai, maka kemungkinan disintegrasi bangsa dan munculnya konflik dapat dihindarkan. (Suara

Pembaruan: 09/09/04). Konflik antarbudaya yang disebut oleh Samuel P. Huntington (1993) sebagai benturan antar peradaban akan mendominasi politik global. Dalam bukunya yang terkenal, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, Hantington menyebutkan bahwa terjadinya berbagai konflik sosial dan etnis di berbagai belahan dunia antara lain disebabkan oleh perbedaan kebudayaan yang semakin nyata. Untuk menghindari benturan tersebut, atau setidaknya meminimalkan dampak dari benturan tersebut menurut salah seorang penulis lepas online, pemahaman tentang keanekaragaman kebudayaan, (www.penulislepas.com. Dalam Rifai 2006)

PENDIDIKAN MULTIKULTUR DAN MASYARAKAT MADANI

Pendidikan

Definisi operasional mengenai pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang masyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global (Tilaar, 1999, hal 28). Manusia adalah individu yang bereksistensi. Eksistensi tersebut perlu digali dan dikembangkan secara menyeluruh, guna membangun manusia yang seutuhnya. Seutuhnya berarti bahwa individu dibentuk hingga mencapai tingkat integritas yang optimal. Individu yang berintegritas memiliki keseimbangan perkembangan rohani dan jasmani yang sehat. Penumbuhkembangan individu tersebut perlu memerhatikan konteks dimana individu hidup, tumbuh, dan berkembang. Artinya potensi-potensi lokalitas menjadi faktor penunjang terbentuknya pertumbuhan individu melalui pendidikan. Berkaitan dengan penumbuhkembangan eksistensi peserta didik, pendidikan juga berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Hasil dari proses pendidikan yang diupayakan ini dapat memberikan kontribusi bagi

terwujudnya masyarakat madani dengan memerhatikan dimensi lokal, nasional, bahkan global.

Multikultural

Multikultural mengacu kepada pengertian suatu kondisi budaya yang beragam. Mahfud dalam bukunya yang berjudul "Pendidikan Multikultural" menyebutkan bahwa multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Budaya satu dengan yang lain dapat menjadi kekuatan di tengah krisis multidimensi seperti pada masa sekarang ini. Eksistensi-eksistensi keragaman budaya dapat secara bersama-sama menjadi kekuatan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi semakin kokoh. Keragaman budaya tidak hanya melihat suatu fakta tentang adanya keragaman sukubangsa dan budaya namun harus dipandang dari aspek kesederajatan. Kesederajatan menjadi kata kunci yang sangat utama dalam rangka menghargai dan menghormati eksistensi antarbudaya tersebut. Sedangkan Menurut Parsudi Suparlan, akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. (2002). Kehidupan manusia atau individu yang hendak dibangun atas dasar budaya yang berlaku dimana individu tersebut. Dengan berpedoman kepada budaya setempat, realitas budaya dalam keragaman adalah suatu hal yang harus dilihat sebagai sesuatu yang pasti dan tak terelakkan. Di situlah individu harus hidup, tumbuh dan berkembang secara utuh dalam perspektif keragaman budaya.

Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural berarti usaha menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik secara optimal dari aspek rohani dan jasmani, dengan memerhatikan keragaman budaya dengan prinsip kesederajatan. Sejalan dengan hal itu, Mahfud menjelaskan bahwa Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks, di mana egosentrisme, etnosentrisme, dan chauvinisme yang pada gilirannya memunculkan

klaim kebenaran (*truth claim*) terus menggejala pada masing-masing individu. Dengan demikian, pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi (Mahfud, 2007). Arus globalisasi dengan ciri individualitas yang semakin tinggi, ditambah dengan relativitas budaya dan berpikir harus diatasi dengan pendidikan multikultur yang semakin intens dan konsisten, serta utuh. Hal ini penting dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat madani di negara Indonesia yang multikultur. Dengan demikian, pendidikan multikultur memiliki tanggung jawab terhadap keutuhan keragaman budaya dalam menghindari konflik social serta pelanggaran permasalahan hak asasi manusia. Lebih jauh Mahfud menyatakan bahwa pendidikan multikultural berfungsi sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan (Hilda Hernandez Dalam *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*, 1989) Atau dengan kata lain, bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.

Masyarakat Madani

Penjelasan Masyarakat madani dan karakteristiknya berikut ini diambilkan dari buku "Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Oleh Srijanti,dkk. Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini (Zbigniew Rau). Sementara Han Sung-Joo menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan kerangka hukum yang melindungi

dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, warga yang independen, pergerakan yang mengakar dalam masyarakat.

Di Indonesia, masyarakat madani didefinisikan sebagai sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparency sistem*.

Lebih jauh Masyarakat madani menurut Rahardjo ialah masyarakat yang beradab. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep *Civil society* juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamadhun* (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan konsep *Al Madinah al fadhilah* (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan. Dalam memasuki milenium III, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti *status quo* menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar, jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Karakteristik Masyarakat Madani

Adapun karakteristik masyarakat madani seperti yang dikemukakan Srijanti,dkk dalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi" sebagai berikut:

1. *Free Public Share.*

Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat

2. *Demokratis*

Masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama.

3. *Toleran*

Kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. *Pluralism*

Masyarakat yang tidak monolitik. Adanya pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bond of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*). (Nurcholis Madjid).

5. *Keadilan Sosial*

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Dunia pendidikan dewasa ini bisa terjebak pada pembentukan manusia dari segi intelektualitas saja. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang ditandai dengan persaingan pasar yang sangat bebas. Pertarungan ekonomi dengan konsep pasar bebas mau tidak mau membawa suatu negara untuk memacu diri dengan pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata. Pendidikan yang memfokuskan diri pada aspek intelektual semata akan berdampak pada terjadinya persaingan yang tidak sehat. Adanya

kecurangan, ketidakjujuran dalam UAN menjadi bukti disorientasi pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan kemungkinan besar telah menjadi sarana agenda politik. Guna mencapai standar mutu pendidikan nasional yang telah ditetapkan malahan membuat sekolah-sekolah mengizinkan perbuatan curang terjadi di sekolah demi mencapai target tersebut. Target pencapaian secara nasional dengan demikian bisa jadi telah mengeliminir fakta kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu paradigma pendidikan perlu diubah. Tilaar menyatakan bahwa cita-cita reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia. Oleh sebab itu paradigma baru pendidikan nasional diarahkan kepada terbentuknya masyarakat madani Indonesia tersebut (1999, hal.168). Pencapaian masyarakat madani tersebut harus memperhatikan keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu berikut ini dirancang mengenai pendidikan multikultural untuk mencapai masyarakat madani sebagai berikut:

A. Perancangan Kurikulum

Ciri masyarakat madani adalah desentralistik. Dalam ranah pengembangan kurikulum pendidikan seharusnya pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperhatikan kondisi-kondisi daerah dalam merancang kurikulum. Artinya, kurikulum dirumuskan dengan memperhatikan rakyat, berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat bukanlah objek pendidikan yang menerima mentah-mentah dari pusat, namun secara langsung atau pun tidak, kerangka pendidikan nasional itu dibangun atas nilai-nilai budaya yang beragam tersebut. Pemerintah berfungsi dalam mengawasi dan mengarahkan. Dengan mengikutsertakan potensi keragaman, maka proses demokratisasi pun terwujud. KBK yang berorientasi kepada kearifan lokal perlu ditingkatkan lagi guna optimalisasi kurikulum. Dengan mengikutsertakan rakyat maka, pendidikan bukanlah dikuasai pemerintah pusat, apalagi sebagai pipa saluran politik. Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun Daerah semestinya turut menyuarakan potensi keragaman lokal tersebut guna menyusun kerangka kurikulum nasional yang berorientasi keragaman tersebut. Sebagai suatu contoh, Kurikulum Berbasis

Kompetensi yang memberikan keleluasaan dalam pengembangan indikator pembelajaran adalah usaha nyata dalam mengoptimalkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah dalam hal ini tidak bisa lepas tangan, karena daerah-daerah di Indonesia memiliki variabel budaya yang sangat berbeda, demikian pula dalam budaya pola pikir mereka. Buku-buku pelajaran mestinya bisa disesuaikan dalam formatnya sesuai dengan variabel daerah tersebut.

Lebih jauh, Tilaar menguraikan dampak positif desentralisasi pendidikan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional akan mengembangkan kebudayaan lokal. Dengan demikian masalah pengisian muatan lokal di daerah-daerah telah merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan, dipersiapkan, dan dikembangkan.
- b. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional akan mengembangkan kebudayaan nasional sebagai benteng tangguh menghadapi pengaruh global yang negatif. Sejalan dengan itu akan mengembangkan identitas bangsa Indonesia yang akan membuat ketahanan nasional.
- c. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional akan mengembangkan inisiatif untuk bereksperimen dan bersaing dalam pengembangan mutu pendidikan nasional menghadapi persaingan bebas.
- d. Desentralisasi manajemen pendidikan nasional akan meningkatkan peran masyarakat swasta untuk mengembangkan ciri khasnya sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

B. Proses Belajar

Negara Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai kekayaan budaya. Dengan adanya ragam budaya lokal ini, diharapkan dapat membentuk Kebudayaan Nasional. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dapat menyelenggarakan

aktivitas yang mengacu kepada nilai-nilai apresiasi berupa menghargai dan menggemari kebudayaan yang beragam tersebut. Aneka budaya dapat dikembangkan dalam program sekolah seperti Cultur Festival. Dengan apresiasi yang tumbuh terhadap keragaman budaya, maka kultur tersebut dapat menjadi suatu kekuatan di tengah krisis multidimensi. Konflik antarbudaya dan sukubangsa dapat dikikis melalui kegiatan apresiasi budaya nasional, kebudayaan yang dimiliki seluruh bangsa Indonesia.

C. Pembelajaran yang Terintegrasi

Pembelajaran multikultural bukanlah semata-mata tanggung jawab guru-guru Sosiologi, Sejarah, maupun Geografi karena pencapaian masyarakat madani meliputi proses demokrasi yang luas. Di dalam pembentukan masyarakat madani harus utuh meliputi semua elemen ciri-ciri atau karakteristik masyarakat madani. Pembangunan masyarakat madani dalam ranah sekolah harus terintegrasi dalam seluruh bidang pelajaran. Di dalam pelajaran Bahasa Indonesia, tercakup dimensi bahasa dan sastra yang sangat luas. Melalui karya sastra, anak-anak di sekolah dapat menggali nilai-nilai budaya suatu daerah, pola pikir, kebiasaan, serta tata cara hidup suatu masyarakat.

Dengan memahami latar belakang budaya masyarakat yang berbeda-beda, maka praktik berkehidupan diharapkan akan menghormati keragaman tersebut. Sebaliknya, pola pikir masyarakat yang tidak baik yang ditunjukkan tokoh-tokoh dalam suatu karya sastra dapat menjadi pelajaran moral yang penting bagi pertumbuhan karakter mereka. Nilai-nilai kerja keras, pantang menyerah, dan nilai pentingnya pendidikan dalam Laskar Pelangi misalnya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pola pikir yang positif. Dengan mempelajari puisi, anak-anak dapat memahami dan mempraktikkan bagaimana menghormati dan menjunjung tinggi agama-agama lainnya, seperti yang ditunjukkan Chairil Anwar dalam karangan puisinya yang berjudul Isa. Meskipun Chairil Seorang yang menganut agama Muslim namun ia menciptakan puisi yang berisi kisah penyaliban Nabi Isa Almasih. Melalui pembelajaran lawan kata atau antonim, anak-anak belajar berlaku sportif dan menghargai yang

kalah. Ada kata kalah, demikian pula ada kata menang. Akan tetapi yang menang pun sebenarnya membutuhkan orang yang kalah. Tanpa kekalahan, kemenangan tidak bisa terjadi. Di sinilah filosofi pembelajaran antonim atau lawan kata tersebut. Anak-anak akan belajar bagaimana yang menang berhak menerima pujian sebaliknya, yang kalah belajar untuk lebih berusaha lagi. Melalui berbagai mata pelajaran, anak diajarkan tidak hanya pada ranah kognitif, terlebih dari itu diajarkan pula mengenai sikap seperti tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai makhluk individu yang harus memiliki suatu keterampilan guna menghadapi kehidupannya. Dalam arti ini, anak dilatih agar dapat mandiri dengan skill yang diperoleh dalam proses pendidikannya. Dengan demikian, pendidikan juga bermakna sebagai memanusiakan manusia. Manusia sebagai makhluk individu yang bertanggung jawab kepada dirinya sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dengan penanaman nilai-nilai semacam itu, hasil yang dicapai adalah kontribusinya terhadap masyarakat terutama dalam menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketentraman. Manusia yang berpendidikan adalah manusia yang dapat memberikan sumbangan-sumbangan positif terhadap kehidupan dan kelangsungan masyarakat.

Aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah terwujudnya pendidikan demokrasi. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri individu-individu yang demokratis. Melalui praktik pembelajaran di sekolah, anak-anak dilatih mengembangkan sikap yang demokratis. Praktik pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, bahkan pengambilan-pengambilan keputusan dalam menentukan peraturan di kelas, dapat melibatkan seluruh siswa dalam suasana yang demokratis. Melalui pembelajaran demokrasi berarti melatih mereka untuk terbiasa menghargai pendapat, menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat dalam adu argumentasi, menyadari kesamaan hak, menyadari keberbedaan, serta kepatuhan kepada moral.

D. Hasil yang Diharapkan

Berbagai langkah seperti yang ditawarkan penulis di atas, maka hasil yang akan dicapai dalam pembentukan masyarakat madani melalui

pendidikan multikultural adalah tercapainya sikap-sikap yang mengacu kepada karakteristik masyarakat madani antara lain :

Pertama, terwujudnya masyarakat sebagai rumah persemaian bagi kebebasan berpendapat dalam keragaman budaya, agama, suku bangsa, dan ras.

Kedua, terwujudnya suatu masyarakat yang saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya sehingga tumbuh masyarakat yang damai, tentram dan aman guna menumbuhkembangkan manusia yang utuh.

Ketiga, menciptakan masyarakat yang toleran dengan kesadaran penuh atas adanya keberbedaan dalam setiap dimensi.

Keempat, terwujudnya kesatuan masyarakat dalam keberbedaan. Terciptanya masyarakat yang plural dengan tetap mengutamakan keselamatan bersama.

Kelima, tercipta suatu keadilan sosial, keseimbangan hak dan kewajiban bagi setiap warga masyarakat.

SIMPULAN

Dari penjelasan dan argumentasi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam bingkai pendidikan dapat dirancang pendidikan dengan memperhatikan perancangan kurikulum, proses pembelajaran, proses pembelajaran yang terintegrasi.
2. Hasil yang diharapkan dari pendidikan multikultural adalah terbentuknya individu yang mandiri dan bertanggung jawab, terciptanya aspek kebebasan berpendapat dalam demokrasi yang santun, rasa saling menghormati dan menghargai, terciptanya kesatuan masyarakat, dan keadilan sosial yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan Nasional.1996-2010. 1996. Daftar Istilah.Jakarta : kemdiknas.go.id

Tilaar, H.A.R. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. 1999. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rifai, Agus. *Karya Ilmiah bagi Pustakawan*. 2006. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Mahfud Choirul. *Pendidikan Multikultural*. 2007. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Srijanti,dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. 2009. Jakarta: Salemba Empat.